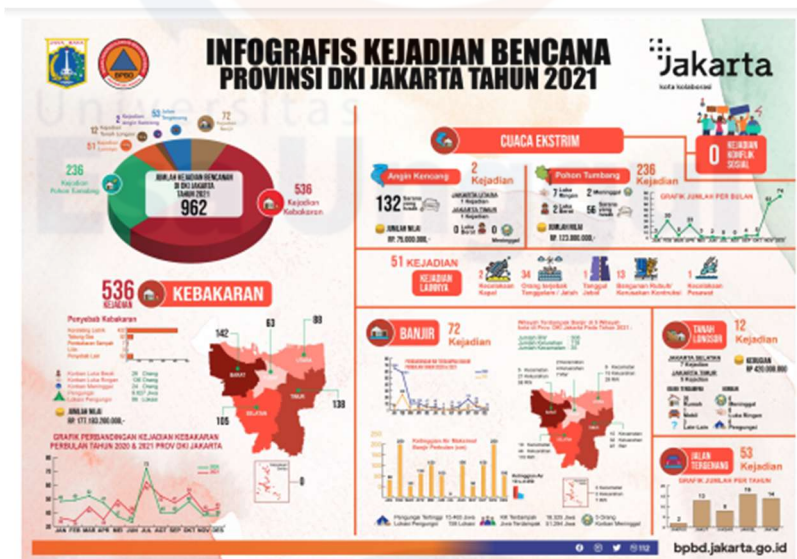


BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Banjir menjadi salah satu permasalahan terbesar yang selalu berdampingan dengan kehidupan masyarakat Jakarta, bencana banjir di Jakarta memiliki dampak yang sangat serius terhadap keselamatan dan juga kenyamanan masyarakat Jakarta. Meskipun banjir di Jakarta sudah menjadi rutinitas dan hal yang biasa namun tidak dapat dipungkiri penanggulangan bencana banjir yang sudah terjadi dan biasa dihadapi ternyata belum optimal dalam pelaksanaannya. Sebagai ibu kota negara DKI Jakarta memiliki sejumlah permasalahan yang sangat rumit dan mengakar puluhan tahun lamanya. Berdasarkan data BPBD Jakarta yang dimuat website resmi mereka (UPT PDIK, 2021) <https://bpbd.jakarta.go.id> (Diakses : 22 Desember 2021) menyatakan bahwa Provinsi DKI Jakarta memiliki luas wilayah sebesar 661,5 km², dengan 24.000 hektar atau 40 % berada pada dataran yang rendah dimanah rata-rata ketinggian berada di bawah permukaan air laut. Provinsi DKI Jakarta menjadi pertemuan sungai dari wilayah Selatan yang memiliki kecenderungan miring dengan intensitas hujan yang tinggi. Jakarta memiliki sungai sebanyak 13 yang mengalir wilayah dan berakhir di teluk Jakarta. Dengan demikian, keadaan ini membuat wilayah DKI Jakarta mempunyai potensi yang tinggi terdampak banjir.



Gambar 1.1 Data kebencanaan DKI Jakarta 2021 (<https://bpbd.jakarta.go.id/perpustakaan/97/infografis-kejadian-bencana-2021>)

Berdasarkan data infogarfis yang dikeluarkan oleh BPBD DKI Jakarta, memperlihatkan bahwa kebencanaan yang terjadi di wilayah Jakarta sangat bervariasi, meskipun bencana banjir selalu menjadi kebencanaan yang selalu menjadi problematik masyarakat kota Jakarta. Menurut Departemen Lingkungan Hidup BEM UI 2020 dan Departemen SILL HMD Geografi UI 2020 (Department Lingkungan Hidup BEM UI 2020, 2020) <http://green.ui.ac.id/banjir-di-jakarta-apakah-sebatas-fenomena-alam/> (Diakses: 22 Desember 2021) mengatakan “banjir telah melanda sejumlah wilayah di DKI Jakarta berulang kali tahun 2020, daerah Jakarta Timur menjadi yang terparah pada bulan Februari, dimanah terdapat 25 kelurahan dengan jumlah pengungsi sebanyak 758 jiwa. Ada pun wilayah yang paling sedikit banjir adalah Jakarta Utara dan Jakarta Barat yang hanya melanda 5 kelurahan. Beberapa wilayah yang paling sedikit terdampak banjir adalah Jakarta Utara dan Jakarta Barat hanya lima kelurahan yang terdampak. Bencana banjir menimbulkan dampak yang buruk bagi masyarakat, terutama pada aspek kesehatan dan ekonomi”. Direktorat Jenderal Pengendalian Perubahan Lingkungan dari Dinas Iklim (<http://ditjenppi.menlhk.go.id>) mengklarifikasi bahwa banjir adalah yang kedua di mana serangga penyebar infeksi. Dengan kondisi seperti ini, kasus infeksi seperti penyakit usus dan demam berdarah dengue akan sangat besar, yang akhirnya menjadi endemis.

Dalam berbagai kasus, orang-orang yang terdampak tidak dapat membayar di tengah bencana banjir dan menyebabkan kematian. Berdasarkan informasi dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi, bencana banjir di pertengahan tahun 2020 ini merupakan banjir yang paling banyak menimbulkan kerugian. Selama empat puluh tahun terakhir, pesatnya pertumbuhan penduduk Jakarta membuat daerah resapan air berkurang drastis karena telah berubah menjadi daerah yang maju dan modern. Pada lahan-lahan yang sudah menjadi daerah resapan air, semen dan pengaspalan dilakukan untuk mengatasi permasalahan daerah setempat sehingga tidak dapat mengasimilasi air.

Bertambahnya jumlah tempat tinggal juga merupakan pemicu dalam pengambilan air tanah secara konsisten yang kemudian, pada saat itu bersamaan menambah penurunan kapasitas tanah untuk menyerap air permukaan. Pola ini menunjukkan bahwa aksesibilitas lahan merupakan masalah yang signifikan bagi peningkatan Wilayah DKI Jakarta. Semua ini adalah akibat sah dari kemajuan dan perekonomian Jakarta yang tak terelakkan. Terjadinya banjir di DKI Jakarta bukan salah dari satu pihak saja. Dibutuhkan tekad, perencanaan, dan penerapan yang konsisten dari berbagai pihak untuk menghadapi kondisi alam yang tidak bersahabat, tentunya guna mencari solusi terbaik yang bisa dilakukan. Pemerintah atau manajemen dapat melakukan penyuluhan secara berkala tentang antisipasi banjir dalam jangka pendek dan jangka panjang sehingga dapat meningkatkan kesadaran lingkungan bagi masyarakat. Selain itu, perlu adanya kebijakan dan

komunikasi secara berkala kepada masyarakat mengenai penanggulangan bencana banjir untuk mencegah jatuhnya korban jiwa dan kerugian.

BPBD DKI Jakarta sebagai organisasi yang memiliki kapasitas dalam pengurusan bencana lokal, perlu bergerak ke daerah setempat untuk situasi ini sebagai antisipasi dan moderasi. Penyusunan data iklim, perubahan lingkungan, ketinggian air, dll. Harus disampaikan kepada masyarakat secara umum untuk membangun kewaspadaan dan kesiapan dalam mengantisipasi banjir, serta pertolongan kepada korban banjir. Dalam rangka penanggulangan bencana banjir maka perlu bagi pihak pemerintah provinsi DKI Jakarta, melalui BPBD DKI Jakarta untuk pro aktif dan menjadikan masalah banjir sebagai prioritas, dalam upaya itu maka perlu dilakukan berbagai macam jenis kegiatan, sosialisasi, informasi dan kampanye untuk meningkatkan partisipasi dan kesadaran masyarakat terhadap bahaya banjir.

Selain itu BPBD juga perlu memberikan informasi yang benar kepada masyarakat di tengah isu bahwa Jakarta akan tenggelam, seperti yang dimuat di media nasional salah satunya (TimDetik.com,2021), selain itu juga seperti dilansir dari BBC Indonesia (Anugerah, 2021) <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-59115275> (diakses : 22 Desember 2021) fakta bahwa *La Nina* diperkirakan terjadi di Indonesia hingga akhir 2021 atau awal 2022 - antara bulan Desember, Januari, dan Februari. Fenomena tersebut ditandai dengan peningkatan curah hujan di sebagian besar wilayah Indonesia. Data BMKG mengindikasikan bahwa *La Nina* tahun ini akan mirip dengan tahun lalu, mengakibatkan peningkatan curah hujan hingga 70% dari kondisi normal. Bahkan *La Nina* telah mengakibatkan banjir di wilayah Kalimantan, terutama di Sintang.

Selain itu fenomena naiknya permukaan air laut juga menjadi perhatian serius yang harus diwaspadai, dalam musim penghujan fenomena naiknya air laut dapat menjadi ancaman bagi masyarakat. Bagaimana pemerintah DKI Jakarta dalam hal ini BPBD DKI Jakarta dalam upaya penanggulangan bencana banjir dan kesiapan mereka dalam penanggulangan bencana. Dalam berbagai kegiatan pemprov DKI melakukan beberapa hal, seperti sumur serapan, namun di beberapa tempat juga tidak berjalan dengan baik dengan kurangnya sosialisasi, selain itu pencegahan memang penting namun tidak kalah penting adalah Penanggulangan bencana, bagaimana meningkatkan kesadaran masyarakat agar siap siaga bencana dapat di jalankan, sehingga dapat meminimalisir korban dan bahkan kerugian.

Everett M. Rogers (Cangara Hafied, 2017:35) berpendapat bahwa “Komunikasi adalah proses di mana suatu ide dialihkan dari sumber kepada suatu penerima atau lebih, dengan maksud untuk mengubah tingkah laku mereka.” Untuk itu diperlukan penyampaian informasi dan edukasi yang efektif dalam upaya

Penanggulangan bencana banjir. Komunikasi menjadi aspek yang penting dalam rangka mengurangi dampak banjir, terutama di era digital saat ini keterbukaan dan kecepatan informasi menjadi sangat penting. Media sosial sudah menjadi bagian penting dalam kehidupan masyarakat, sebab itu media sosial dapat dijadikan sebagai media penyampaian informasi, persuasi dan edukasi penanggulangan bencana. Menurut Kaplan & Haenlein yang dikutip dalam buku *strategic social Media* (Mahoney, 2017:9) media sosial didefinisikan sebagai sekelompok aplikasi berbasis internet yang dibangun di atas fondasi ideologi dan teknologi Web 2.0 yang memungkinkan pembuatan dan pertukaran konten yang dihasilkan pengguna.

Kondisi wilayah yang dimiliki oleh provinsi DKI Jakarta sebagai wilayah yang rawan bencana menuntut kesiagaan terhadap bencana yang perlu dimiliki oleh setiap warga masyarakat. Untuk itu kepada warga masyarakat perlu dibekali dengan pengetahuan tentang penanggulangan bencana. Pada situasi inilah Badan Penanggulangan Bencana Daerah berperan penting untuk menyebar luaskan informasi tentang penanggulangan bencana kepada masyarakat. Dalam menjalankan peran dan fungsinya tersebut BPBD perlu merencanakan strategi komunikasi yang baik agar penyebarluasan informasi mengenai penanggulangan bencana alam kepada masyarakat dapat berjalan dengan efektif dan tepat sasaran. Efektif dan efisiennya BPBD dalam menyebarluaskan informasi dan edukasi mengenai penanggulangan bencana alam tersebut tentunya akan memberikan dampak yang positif pula terhadap eksistensi dan keberadaan BPBD DKI Jakarta.

Statistik Bencana Menurut Wilayah

Prov. DKI JAKARTA, 2021

Wilayah	Jumlah	Korban					Kerusakan									
		Meninggal (3)	Hilang (4)	Terluka (5)	Menderita (6)	Mengungsi (7)	Rumah (8)	Pendidikan (9)	Kesehatan (10)	Peribadatan (11)	Fasum (12)	Perkantoran (13)	Jembatan (14)	Pabrik (15)	Kios (16)	
71. KOTA JAKARTA SELATAN	3	1	1		8.419	3.689										
72. Kota Jakarta Timur	7				13.462	2.055										
73. KOTA JAKARTA PUSAT	1															
74. KOTA JAKARTA BARAT	3	3			8.988	1.446										
75. Kota Jakarta Utara	3															
Jumlah	17	4	1	0	30.869	7.190	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Bidang Pengelolaan Data dan Sistem Informasi (PDSI),
Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan (Pusdatinkom),
Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB)

Gambar 2. Statistik Kebencanaan

Namun pada kenyataannya, yang tampak di lapangan adalah bahwa masih terdapat masyarakat yang masih kurang memahami bahkan belum mengetahui secara detail bagaimana cara penanggulangan bencana tersebut. Masih terdapat masyarakat yang tampak masih kebingungan dengan hal apa saja yang perlu dan harus mereka lakukan jika terjadi bencana di wilayah mereka sehingga resiko kebencanaan tidak dapat di minimalisir yang pada akhirnya mengakibatkan jatuhnya korban.

Sementara menurut Laura sebagian besar layanan media sosial mendorong kolaborasi, interaksi, dan komunikasi melalui diskusi, umpan balik, pemungutan suara, komentar, dan berbagi informasi dari semua pihak yang berkepentingan (Malita, 2011). Media sosial bisa dijadikan alat untuk memobilisasi publik, tidak heran jika media sosial menjadi media yang sangat penting dalam menunjang aktivitas pemerintahan, organisasi di era *New Media* saat ini. Media sosial dengan pesan dan penyampaian yang baik akan menciptakan komunikasi dua arah yang berkesinambungan dan saling mempengaruhi, sehingga Penanggulangan bencana berjalan dengan baik dan efektif. Bagi organisasi atau lembaga, perencanaan komunikasi strategi bisa dilihat pada penjabaran visi, misi, dan tujuan yang ingin dicapai. Oleh sebab itu perencanaan komunikasi strategi dalam tataran kebijakan nasional (*National policy*) dapat digolongkan sebagai perencanaan komunikasi jangka panjang (Cangara Hafied, 2017:51)

Berdasarkan hasil penelitian yang dikemukakan oleh Ni Made Ras Amanda Gelgel yang berjudul *Media Sosial dan Literasi Kebencanaan di Bali* dengan menggunakan metode penelitian deskriptif kuantitatif dengan pengumpulan data menggunakan kuesioner. Kuesioner disebar pada bulan Agustus 2018 kepada 410 responden di seluruh Kabupaten di Provinsi Bali, menunjukkan bahwa Masyarakat di Bali tercatat telah mendapat terpaaan mengenai informasi bencana secara luas. Sumber informasi mengenai kebencanaan yang paling banyak digunakan adalah dari media sosial. Namun temuan sementara peneliti berdasarkan data dari Instagram BPBD DKI Jakarta, terlihat *viewers* atau Penonton dari salah satu konten pada akun media sosial Instagram hanya sebanyak 560 penonton saja. Hal ini yang menjadi permasalahan, dimanah jumlah followers akun Instagram BPBD DKI Jakarta mencapai 67.100 followers tetapi *views* terbanyak hanya mencapai 560 View. Hal ini menunjukkan bahwa informasi yang disampaikan oleh BPBD tidak sampai kepada seluruh masyarakat, dan juga rendahnya minat masyarakat terhadap informasi yang disampaikan oleh BPBD. Berdasarkan hasil pengamatan sementara yang dilakukan peneliti, hal yang sama juga terjadi di media sosial Twitter jumlah followers nya 297.5000 orang dan Facebook berjumlah 13.000 orang, dengan demikian total jumlah pengikut keseluruhan media sosial BPBD pada ketiga media sosial tersebut sebesar 377.600 orang, sementara jumlah penduduk Provinsi DKI Jakarta sebesar 10.609.681 jiwa. Jumlah ini tidak bisa mewakili penyebaran informasi yang dilakukan oleh BPBD DKI Jakarta di media sosial.

Dalam kaitannya dengan audiens yang disasar dalam edukasi mitigasi bencana, belum ditemui konsep perancangan yang cukup komprehensif untuk menghadapi problem-problem komunikasi kebencanaan. Narasi besar terkait prinsip kebenaran dan kesejahteraan yang dianggap universal kurang mampu mengakomodasi keragaman usia , pendidikan, karakter pengguna media sosial dan

target audiens di wilayah DKI Jakarta sehingga diperlukan sistem desain , pemilihan dan penyusunan pesan untuk setiap karakteristik yang berbeda. Desain pada media yang dikonsumsi publik belum mempertimbangkan peruntukan dari pesan tersebut sehingga baru bersifat informatif dan belum melakukan persuasi lebih jauh. Desain yang ditemukan dalam penelusuran awal kebanyakan bersifat generik dan kontennya untuk audiens yang digeneralisasi, pesan yang disampaikan *relative* sama. Kondisi ini kurang mendukung proses penanaman informasi yang bersifat kedaruratan menjadi kebiasaan dan membentuk budaya keselamatan sejak usia dini dimana kemandirian secara fisik dan psikis belum terbentuk. Hal ini menjadi penting bagi BPBD DKI Jakarta yang ingin menciptakan siklus edukasi kebencanaan yang pasif, satu arah dan tidak intens untuk menampilkan sisi baiknya dalam cara mentransformasikan kesadaran dari respon terkondisi menjadi partisipasi aktif.

Berdasarkan uraian pemaparan masalah di atas, dan dikaitkan dengan pentingnya strategi komunikasi yang baik dan efektif untuk dilakukan sebuah organisasi atau lembaga Kebencanaan. Maka peneliti mencoba untuk meneliti lebih lanjut mengenai strategi komunikasi yang dilakukan BPBD tersebut dengan mengangkat Judul **“Strategi Komunikasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah DKI Jakarta Dalam Upaya Penanggulangan Bencana Banjir Melalui Media Sosial”**

1.2 Rumusan Masalah

Resiko bencana di DKI Jakarta dipengaruhi oleh ancaman bencana, kerentanan dan kapasitas dalam menghadapi ancaman yang ada. Curah hujan tinggi dalam waktu yang pendek meningkatkan tingkat bahaya banjir akibat topografi wilayah, daya dukung lingkungan yang semakin menurun maupun kerentanan dan kapasitas warga dalam menghadapi ancaman bencana. Ragam permasalahan kebencanaan yang melanda Jakarta, angin kencang, naiknya permukaan air laut, selain itu kebencanaan lain juga menghantui masyarakat Jakarta, kepadatan penduduk mengakibatkan resiko kebakaran juga tinggi, untuk itu diperlukan perancangan strategi komunikasi untuk mengurangi dampak atau resiko bencana yang menimpa masyarakat Jakarta, dengan penyampaian pesan atau informasi yang tepat maka diharapkan masyarakat mendapatkan informasi dan lebih siap dalam menghadapi kemungkinan kebencanaan yang terjadi. Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis ingin mengetahui tentang **“Bagaimana Strategi Komunikasi BPBD DKI Jakarta Dalam Upaya Penanggulangan Bencana Melalui Media Sosial”?**

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini yaitu, mengetahui **Bagaimana Strategi Komunikasi BPBD DKI Jakarta Dalam Upaya Penanggulangan Bencana Melalui Media Sosial**, terutama di era perkembangan teknologi komunikasi, media sosial menjadi salah satu instrumen penting dalam penyampaian informasi dan komunikasi antara pemerintah dengan masyarakat. Dalam rangka melakukan mengoptimalkan mitigasi bencana, baik pra-bencana, saat bencana terjadi dan pasca-bencana.

1.4 Manfaat Penelitian

Peneliti berharap dapat memberikan manfaat dalam penelitian ini dalam dua aspek, yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis.

1.4.1 Manfaat Teoritis

Hasil Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat teoritis, sebagai berikut :

- a. Menambah wawasan teori-teori di bidang konsentrasi komunikasi terutama hubungan masyarakat (*public relations*)
- b. Pemahaman tentang upaya pemerintahan dalam menanggulangi bencana daerah

1.4.2 Manfaat Praktis

Peneliti berharap, penelitian ini dapat memberikan manfaat praktis, antara lain :

1. Sebagai informasi dan referensi bagi peneliti lain dan pengetahuan bagi pembaca mengenai strategi komunikasi dalam upaya penanggulangan bencana, terutama banjir
2. Meningkatkan pemahaman mengenai pentingnya strategi Komunikasi dalam berkomunikasi di dalam lembaga pemerintahan, organisasi dan perusahaan.
3. Sebagai referensi serta kajian untuk Lembaga Pemerintah Daerah DKI Jakarta dalam meningkatkan Sumber daya dan Kinerja Program Pemerintah dalam menanggulangi bencana daerah dan banjir.